



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PELAKSANAAN  
PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN REJANG  
LEBONG**

**SKRIPSI**



**DEBBY SUSANTY**

**06 940 140**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2010**

Tiada kekafiran yang lebih hebat daripada kebodohan  
Dan tiada harta yang lebih berharga daripada kepandaian  
Orang-orang berilmu dan mencari ilmu merupakan dua sekutu dalam kebajikan  
Sesudah itu tidak ada kebajikan di antara manusia  
(HR. Ibnu Majah)

Indahnya cinta yang diselipkan kerelung hatiku  
Menyemangati untuk meraih sukses  
Putihnya kasih yang disemaikan untukku  
Menambah gairah dalam mencapai cita  
Lembutnya untaian nasehat ditelingaku  
Menyentakkanku dalam kelalaian

Ayahanda ibunda  
Kasihmu begitu tulus dan suci  
Di awal langkahku kau bimbing aku  
Di dalam langkahku engkau tanamkan arti hidup dan kehidupan  
Dalam kesederhanaanmu tanpa merasa lelah, walau dengan air mata  
Demi anakmu semua dihadapi dengan ketabahan, kesabaran dan senyuman  
Aku bangga kepadamu ayah, ibu....  
Berkat doa dan perjuanganmu kucoba mewujudkan impian  
Dengan segala daya yang ada  
Hari ini sepercik keberhasilan telah kucapai  
Sekeping harapan telah kuraih

Namun.....Seribu tantangan masih menghalangiku  
Seribu ujian masih ada di hadapku  
Terima kasih ya Allah.....Engkau telah memberiku kesempatan  
Untuk membahagiakan orang-orang tercinta dan terkasih  
Walaupun belum seberapa yang dapat kuhaturkan  
Peluhmu yang mengucur telah kuteguk demi asa dan cita-cita

Kupersembahkan karya kecil ini  
Buat Papa dan Mama  
Teristimewa untuk yang Ku Sayangi...



# MY TRIBUTE TO

## My Family Yang Luar Biasa ♥☺♥

Papa qu Ir. Djoni yang bekerja sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat dan Mama qu Sri Susilawati, SH yang bekerja sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Curup Rejang Lebong. Hwuaaa... bangga bgt neh jadi anak mam n pap ☺, walaupun dua-dua nya super duper sibuk tapi buat keluarga masih tetap ada waktu..., makasih atas semua semangat, dorongan, dukungan serta doa yang tulus tiada henti hingga akhirnya aq dapat meraih satu dari sekian cita yang ingin direngkuh, dan smoga suatu saat nanti aq jg bisa membuat kalian bangga dan membahagiakan kalian, amiiiiinn. Nenek ku Hj. Nurbaina (hihi...nenek aq-ni orangnya lucu☺ suka ketawa,,baik bgt, sangat brarti dalam hidup aq,,ceramah n petatah-petitihnya InsyaAllah akan slalu by ingat nek), My brother David Johnnie, SH (hehe... bang akhirnya bisa kesusul jg, kita sama neh sama-sama SH, tapi bedanya aq blom jd Jaksa☺, kpn pulang bro??, sepi jg tiada dirimu dirumah). Kakak Qu yang keDua Donna Gracia Jorie, SP (si lesut yang hobby nya marah-marah...,kadang-kadang perhitungan kali untung ruginya topcer = Pelit!!!☺ bang aqon yg sabar yah☺) Kakak qu yang keTiga Corinna Patricia Jorie, SH (si pendiam yang suka ga PeDean..tapi kalau dirumah bawel tapi baik koq apalagi ama kucing..kapan nih aq punya abang ipar?? Lama amat jgn terlalu milih2 kak..) Adek qu Vania Gracia Jorie ( adek bontot qu yang paling lucu & imut, dah tambah tinggi aja, blajarnya tambah rajin dek..Semangattt..paling pintar nih ya iyalah ASI nya 3,5 tahun☺).

## Nafas ku Hidup ku Tersayang ♥♥♥

Rully Kurnia Noventri...si ayank oco..si hidung mancung pipi tomat..yang sangat berarti dalam hidup by..slalu ada disamping by saat duka maupun duka..nemenin by kemana pun by pergi...selalu berdua ♥..makasih ya sayang berkat dukungan dan cinta nya by udah berhasil meraih gelar SH..cepat nyusul ya sayang ♥\_biar apa yang kita impikan slama ini segera terwujud..amiiiiiiiiinn...

## Teman-teman Angkatan 06 ♂♀

Buat semua teman-teman angkatan 06 yang ga bisa aq sebutin satu persatu, yang udah memberikan warna dalam hidup aq..Thanks a lot guuyssssss !!!!!



## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

**(Debby Susanty, 06.940.140, Fakultas Hukum Unand, 76 halaman, 2010)**

### **ABSTRAK**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, menurut pengamatan penulis, aparat penegak hukum kurang memiliki perhatian terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Pasalnya dari segi penyidikan hingga penahanan, seorang anak yang terlibat dalam hukum seringkali diperlakukan layaknya seperti orang dewasa. Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, sebelum diberlakukan UU Pengadilan Anak pada tahun 1998 dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan perkara yang terdakwa adalah orang dewasa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus, pemeriksaan dan perlakuannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong dan merumuskan 3 (tiga) permasalahan yaitu Bagaimana Bentuk Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong, Bagaimana Perlindungan Hak-hak Narapidana Anak Dalam Pelaksanaan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong, dan Apa Kendala-kendala Yang di Hadapi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini berifat deskriptif yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara. Analisa yang dilakukan secara kualitatif yaitu analisa yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kurangnya sarana prasarana terhadap pembinaan narapidana anak, dan penempatan Narapidana Anak telah dipisahkan dari orang dewasa namun tidak adanya bantuan hukum yang diberikan terhadap anak dalam menjalankan proses pidana, serta tidak adanya psikolog anak yang ditambah lagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong kurang peduli terhadap narapidana anak. Oleh karena itu haruslah dilakukan penambahan sarana prasarana dalam proses pembinaan Narapidana Anak, dan diberikan bantuan hukum terhadap anak, serta adanya petugas psikolog anak dan diharapkan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong sama-sama ingin mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW sang Rasulullah sebagai pemimpin dan tauladan umat. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Adapun judul skripsi ini adalah : **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.”**

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada orang tua penulis Papa Ir. H. Djoni yang bekerja sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat dan Mama Hj. Sri Susilawati. SH yang bekerja sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Curup Rejang Lebong, yang telah berkorban jiwa dan raga dalam mendidik penulis menjadi anak yang berguna dan kepada nenek, kakak-kakak dan adik penulis yang telah memberikan motivasi spritual sehingga penulis dapat mempersembahkan karya yang sangat berharga ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bimbingan dan bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Yuliandri, SH. MH, beserta Pembantu Dekan I Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM, Pembantu Dekan II Bapak Frenadin Ade Gustar, SH, Pembantu Dekan III Bapak DR. Kurniawan, SH. MH.



2. Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH., dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Ibu Hj. Efren Nova, SH. MH.
3. Ibuk Yulmayeti, SH. MH. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, motivasi dan memberikan arahan serta petunjuk dalam penulisan skripsi.
4. Ibuk Hj. Efren Nova, SH. MH. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, motivasi dan memberikan arahan serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas andalas yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong yang telah membantu penulis selama Penelitian.
7. Seluruh Staf Administrasi dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2006 yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2010

**Penulis**

**Debby Susanty**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional.....	7
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak dan Pengaturannya dalam Perundang- Undangan .....	16
B. Asas-asas Hukum Perlindungan Anak .....	24
C. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	26
D. Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak .....	38
E. Hak-hak Anak di Dalam Lembaga Pemasyarakatan .....	46
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk-bentuk Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong .....	51



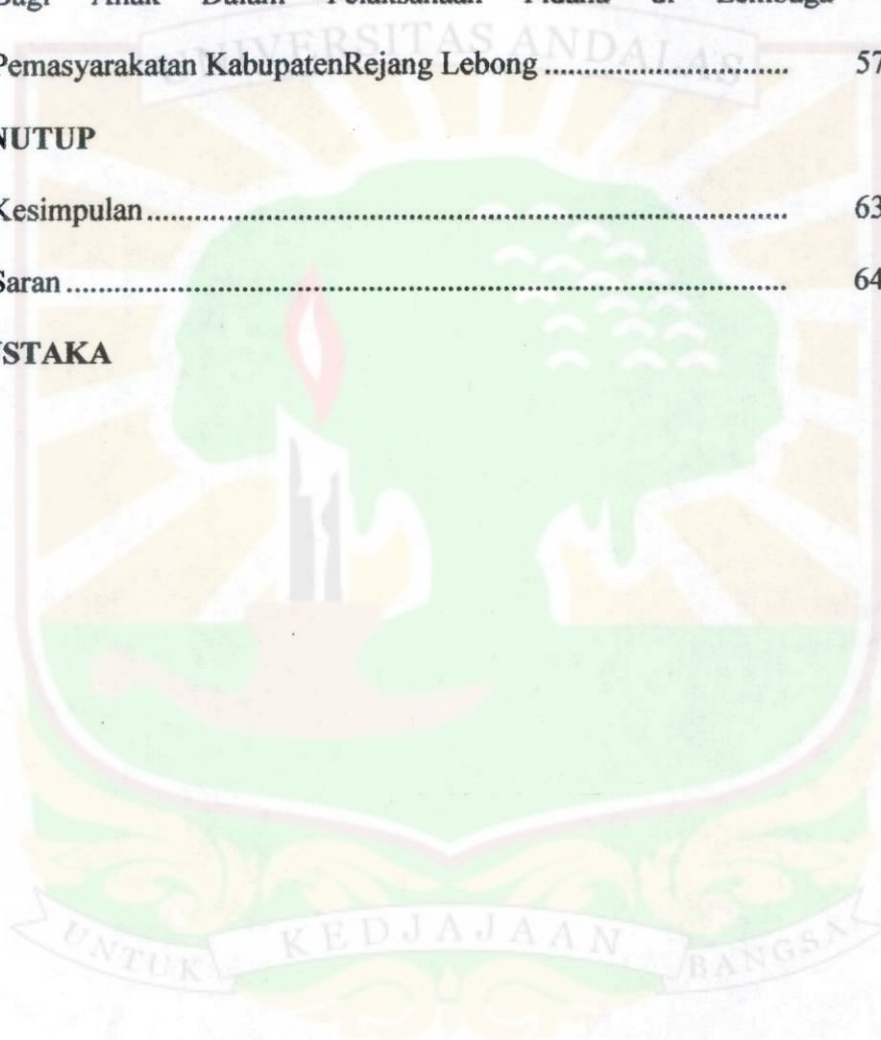
B. Perlindungan Hak-hak Narapidana Anak Dalam Pelaksanaan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.....	54
C. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong .....	57

#### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda juga ada yang disebut remaja dan dewasa.<sup>1</sup> Apa yang disebut generasi muda oleh Dr. Zakiah Daradjat dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun. Menurut beliau generasi muda terdiri dari masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun, dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun.<sup>2</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Oleh

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal.1

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, 1980, *Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta



karena itu terhadap anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat serta dapat merugikan perkembangan pribadinya.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak yang dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Anak nakal melakukan tindak pidana yakni anak yang melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Anak nakal yang dapat diajukan kedepan sidang pengadilan anak minimum berumur 8 tahun dan maksimum belum berumur 18 tahun serta belum pernah menikah.<sup>3</sup>

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhi pidana mati maupun penjara seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimum 10 tahun. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa :<sup>4</sup>

- a. Perampasan barang-barang tertentu

---

<sup>3</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti , Hal.36

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 37



- b. Pembayaran ganti kerugian.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak nakal, diperlukan perangkat hukum dan kelembagaan bagi anak yang terlibat dalam kenakalan. Upaya hukum pidana dalam penanggulangan anak nakal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pidana pokok menurut Undang-Undang Pengadilan Anak pasal 23 ayat (2):

- a. Pidana penjara (maksimum 10 tahun)
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sanksi hukum yang dapat diputuskan tidak hanya berupa pidana tetapi juga berupa tindakan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi :

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah :
  - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
  - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
  - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Menurut pengamatan penulis, aparat penegak hukum kurang memiliki perhatian terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Pasalnya dari segi



penyidikan hingga penahanan, seorang anak yang terlibat dalam hukum seringkali diperlakukan layaknya seperti orang dewasa.<sup>5</sup> Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, sebelum diberlakukan UU Pengadilan Anak pada tahun 1998 dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan perkara yang terdakwa adalah orang dewasa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus, pemeriksaan dan perlakuannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan.<sup>6</sup>

Lebih dari 4.000 anak di Indonesia diajukan ke Pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian, pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun Dinas Sosial. Maka tidaklah mengejutkan sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dijejaskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang sangat memprihatinkan, mereka sering kali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara. Mereka ditempatkan dalam posisi yang penuh bahaya, terjepit dalam penyiksaan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum.<sup>7</sup>

Bagi penulis sendiri tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan putusan hakim, yaitu berupa pemidanaan anak untuk dididik, dibina, atau diberi latihan kerja di lembaga pemasyarakatan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor

---

<sup>5</sup> Koran Kompas tanggal 6 Juli 2008

<sup>6</sup> Gatot Supramono, op.cit, hal 11

<sup>7</sup> [www.google.com](http://www.google.com) / *Laporan Unicef Indonesia*



3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan situasi tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga penulis memilih judul :

**” PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN REJANG LEBONG”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah yang hendak dijadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak Narapidana Anak dalam Pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi anak dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat serta konkrit mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut diatas, yaitu :



1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui hak-hak narapidana anak dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi anak dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Merupakan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu, terutama dalam bidang hukum pidana yaitu dari segi penyidikan hingga penahanan seorang anak yang terlibat dalam hukum seringkali diperlakukan layaknya seperti orang dewasa, sehingga dapat memberikan gambaran bahwa anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan dan seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara.
- b. Merupakan bahan pedoman untuk penelitian lanjutan, baik sebagai acuan maupun sebagai pembandingan bagi penelitian selanjutnya baik dalam teori maupun prakteknya.
- c. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum lainnya dan dapat memberikan tambahan pengetahuan.

## E. Kerangka Penelitian

### 1. Kerangka Teoritis

Sesuai dengan judul yang dibuat yaitu Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong, maka secara teoritis dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum mengatur bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan melindungi hak-hak anak.

Hak – hak anak dilihat dalam konvensi PBB, UU No.1 tahun 1974 sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan
- c. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak, dan kewajiban orang tua serta keluarga
- d. Negara mengakui hak hidup anak dan kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan anak



- e. Hak memperoleh kebangsaan, nama, dan hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya
- f. Hak untuk tinggal bersama orang tua
- g. Kebebasan menyatakan pendapat
- h. Kebebasan berhimpun, berkumpul, dan berserikat
- i. Kebebasan berpikir dan beragama
- j. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental
- k. Memperoleh perlindungan hukum
- l. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
- m. Hak atas pendidikan

Hak – hak anak dalam UU No. 4 tahun 1979 sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas perawatan, kesejahteraan, asuhan
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan
- d. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau badan
- e. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat penyiksaan para narapidana tetapi sebagai wadah yang kebebasannya dibatasi dalam tenggang waktu tertentu.

Latar belakang lahirnya UU Pengadilan Anak, dalam konsiderannya menyebutkan:

- Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita2 bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi dan seimbang
- Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan menyangkut kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Diatur dalam UU Pengadilan anak pasal 45 ayat(1), pasal 51 ayat (1) dan (3), selain itu juga dalam Bab IV pasal 50 samapi 68 KUHAP, kecuali pasal 64

Hak-hak tersangka/terdakwa anak sebagai berikut:

- Setiap anak nakal berhak mendapat bantuan hukum
- Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi
- Tersangka/terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan KUHAP
- Hak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan

## **2. Kerangka Konsepsional**

Dalam kerangka konsepsional ini akan dicoba untuk menguraikan maksud yang terkandung sesuai dengan pengertian umum yang akan diambil dari KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak sesuai dengan judul yang akan dibahas



yaitu Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong dapat di uraikan sebagai berikut :

- 1) Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak terdapat dalam KUHAP UU No.8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
- 2) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok berupa pidana penjara (maksimal 10 tahun), pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Selain itu, ada juga tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu mengembalikan kepada orang tua, wali, menyerahkan kepada negara dan menyerahkan kepada Departemen Sosial.<sup>8</sup>
- 3) Hak-hak Narapidana yaitu melakukan ibadah sesuai agama, mendapat perawatan, mendapat pendidikan, mendapat pelayanan kesehatan, menyampaikan keluhan, mendapat bahan bacaan, mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, mendapat remisi, mendapat kesempatan berasimilasi, mendapat pembebasan bersyarat, mendapat cuti menjelang bebas, dan mendapat hak-hak lain sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>
- 4) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara

---

<sup>8</sup> Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 23 dan 24

<sup>9</sup> Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, batas, dan cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah yang dikaitkan dengan prakteknya di lapangan khususnya aparat pembina pemasyarakatan anak.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dalam

---

<sup>10</sup> Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 butir 1 dan 2



pelaksanaan pidana dilembaga pemasyarakatan berdasarkan ketentuan tersebut dalam kenyataannya dilapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu gejala atau keadaan sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang objek yang diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam melakukan metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a) Data

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan, data ini diperoleh dengan melakukan wawancara pertanyaan yang tidak berstruktur dari pertanyaan yang sebelumnya terlebih dahulu dipersiapkan. Wawancara ini ditujukan kepada petugas LAPAS di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.

#### 2. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan penelitian ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong guna mengambil data di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.

### b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah :

## 1. Studi Pustaka (Penelitian Kepustakaan)

Dalam hal ini penulis membaca dan mempelajari dengan cara meneliti bahan-bahan atau data seperti :

### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang berhubungan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan materi yang penulis bahas:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
2. Berbagai artikel dan jurnal
3. Media cetak dan elektronik
4. Hasil-hasil penelitian.

### c) Bahan hukum Tersier

Setelah melengkapi bahan hukum sekunder tersebut, selanjutnya dicari bahan-bahan melalui literatur pembantu atau pelengkap data, dan bahan-bahan yang termuat dalam bentuk kamus Bahasa Indonesia, dan bahan lainnya yang ada hubungannya dengan skripsi ini.



## 2. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak dan melakukan identifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.

## 3. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara menanyakan hal-hal yang ingin diketahui kepada pihak-pihak yang berkompeten mengetahui masalah tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara terbuka atau tidak berstruktur terhadap pejabat yang terkait, seperti wawancara dengan petugas LAPAS di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.

## 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pengolahan data yang disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang diperoleh dengan menyeleksi dan mengedit data-data mana yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

### b. Analisis Data

Terhadap semua data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh dari penelitian akan disusun dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, dianalisis dengan metode deskriptif

kualitatif yaitu menganalisis hasil penelitian dengan penggambaran kembali berupa kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta melakukan penilaian terhadap data yang ada dengan bantuan berbagai literatur atau bahan yang terkait kemudian baru ditarik kesimpulan secara induktif, kesimpulan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Dari penggambaran tersebut dapat disimpulkan bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam pelaksanaan pidana di Lemabaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Anak Dan Pengaturannya Dalam Perundang-undangan.

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti tentang batasan pengertian anak dibawah umur, namun menurut R.Soepomo ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :<sup>11</sup>

- a. Dapat bekerja sendiri
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri

Penentuan seseorang sebagai anak yang didasarkan pada tingkat usia seseorang, lazimnya dikaitkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku didalam masyarakat tertentu. Di Indonesia dikenal beberapa peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya terdapat adanya penentuan kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Hasil pemahaman selama ini, tampaknya batasan usia seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak menunjukan keanekaragaman.<sup>12</sup>

Untuk meletakkan kedudukan anak dalam arti khusus dibentuk dari ketentuan nilai-nilai yang tumbuh dalam lingkungan agama, sosial, ekonomi, dan

---

<sup>11</sup> Irma Setyawati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal.14

<sup>12</sup> Paulus Hadisupropto, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal.79

politik dari suatu bangsa secara universal. Pengertian kedudukan anak tersebut terdapat pada hal-hal berikut ini:

#### 1. Pengertian Anak dari Religius atau Agama

Kedudukan anak dalam pengertian Islam yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia.

Pengertian ini melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>13</sup>

#### 2. Pengertian Anak dari Aspek Sosiologis

Kedudukan anak dalam aspek sosiologis menunjukan anak sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan masyarakat.

Kedudukan anak dalam pengertian ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Hal ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati karena keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa.<sup>14</sup>

#### 3. Pengertian Anak dalam Bidang Ekonomi

Kedudukan Anak dalam bidang ekonomi adalah elemen yang mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak agar status anak tidak menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PT Grasindo, Hal.10

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal.12

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal.13



#### 4. Pengertian Anak dalam Kedudukan Hukum

Dalam cara pandang ini perlu diketahui status anak atau pengertian anak dalam karakteristik umum yang akan mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dari orang dewasa. Artinya, anak diletakkan kedalam subjek hukum yang digolongkan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Untuk meletakan seorang anak kedalam pengertian subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut subjek hukum seperti orang dewasa dan badan hukum (CV,Firma,PT,dll), maka faktor-faktor yang menjadi dasar adalah unsur-unsur yang berada secara internal maupun eksternal untuk memberikan keterikatan anak terhadap sistem hukum yang ada dari peristiwa hukum yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Unsur-unsur internal dan eksternal tersebut sebagai berikut:<sup>16</sup>

##### a. Unsur Internal Pada Diri Anak

- 1) Subjek hukum ; sebagai seorang manusia anak diletakan pada golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, dan orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- 2) Persamaan hak dan kewajiban anak ; seorang anak juga akan mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan Perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum meletakan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan atau untuk dapat

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal 4

disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa, atau untuk disebut sebagai subjek hukum yang normal.

b. Unsur Eksternal Pada Diri Anak

- 1) Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum itu sendiri.
- 2) Hak-hak yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan Perundang-undangan.

5. Pengertian Anak Menurut UUD 1945

Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

6. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum
- b. Hak-hak anak didalam hukum perdata

Menurut KUH Perdata Pasal 330 (1) mendudukan status anak dengan batas umur belum dewasa dengan yang telah dewasa adalah umur 21 tahun kecuali anak yang sudah kawin sebelum berumur 21 tahun.



## 7. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengklasifikasikan anak kedalam pengertian berikut ini :

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Menurut Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang Nomor 3 tahun 1997) Pasal 1 ayat 1 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

Dalam pengertian anak nakal pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah seseorang yang terlibat dalam

perkara anak nakal. Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 butir 2 mempunyai dua pengertian, yaitu: <sup>17</sup>

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, kriteria anak nakal ini adalah setiap anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang hukum pidana, jadi perbuatan itu merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti pencurian, pemerasan, dan penganiayaan. Istilah anak nakal tersebut erat kaitannya dengan istilah dalam hukum pidana yang disebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, kriteria dari anak nakal ini adalah anak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku secara umum dalam masyarakat seperti ketentuan hukum adat, dimana perbuatan itu sifatnya ringan dan tidak merupakan suatu tindak pidana. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kala anak yang memanjat pohon orang lain pun disebut sebagai anak nakal.
8. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *op.cit*, Hal 21



9. Pengertian Anak yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Terdapat dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

10. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

Tidak secara langsung memberikan pengertian anak, tetapi memberikan batasan usia bagi mereka yang diizinkan untuk menikah. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 6 ayat (2) mengatur syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya dan Pasal 7 ayat (1) mengatakan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu yang maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Yang terpenting seseorang yang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak yaitu 0 (nol) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal secara pasti

faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini :<sup>18</sup>

- 1) Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak
- 2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum
- 3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
- 4) Pengelompokan proses pemeliharaan
- 5) Pembinaan yang efektif.



---

<sup>18</sup> Maulana Hassan Wadong, *op. cit*, Hal.26



## **B. Asas-asas Hukum Perlindungan Anak**

Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) dalam pasal-pasalanya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah :<sup>19</sup>

### **1. Pembatasan Umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1) UU No.3 tahun 1997)**

Adapun Orang yang dapat disidangkan dalam acara Pengadilan Anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 tahun dan maksimum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin.

### **2. Ruang Lingkup Masalah Dibatasi (Pasal 1 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997)**

Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang Pengadilan Anak hanyalah terbatas menyangkut perkara Anak Nakal.

### **3. Ditangani Pejabat Khusus (Pasal 1 ayat (5), (6), dan (7) UU No.3 Tahun 1997)**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti:

- a. Ditingkat penyidikan oleh penyidik anak
- b. Ditingkat penuntutan oleh penuntut umum anak
- c. Dipengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak

### **4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 1 ayat (11) UU No.3 tahun 1997)**

Undang-undang Pengadilan Anak mengakuin peranan dari :

- a. Pembimbing kemasyarakatan
- b. Pekerja sosial

---

<sup>19</sup> Darwan Prinst, *op. cit*, Hal. 15

c. Pekerja sosial sukarela

5. Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997)

Pemeriksaan perkara dipengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga

6. Keharusan Splitsing (Pasal 7 UU No.3 Tahun 1997)

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa maka si anak di adili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa di adili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer diperadilan militer.

7. Acara Pemeriksaan Tertutup (Pasal 8 ayat (1) UU No.3 tahun 1997)

Acara pemeriksaan disidang Pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

8. Diperiksa Hakim Tunggal (Pasal 11, 14, dan 18 UU No.3 Tahun 1997)

Hakim yang memeriksa perkara anak baik ditingkat Pengadilan Negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

9. Masa Penahanan Lebih singkat (Pasal 44 s/d Pasal 49 UU No.3 Tahun 1997)

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHP

10. Hukuman Lebih Ringan (Pasal 22 sampai dengan Pasal 32)



Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lenih ringan dari ketebtuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 tahun.

### **C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

#### **1. Perlindungan Anak Dalam KUHAP (Undang-undang No.8 Tahun 1981).**

Pada hakikatnya ketentuan KUHAP tentang penyidikan didefinisikan berupa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHP).<sup>20</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dalam KUHAP identik dengan perlindungan terhadap orang dewasa. Dalam Bab VI tentang tersangka dan terdakwa, Pasal 50 sampai Pasal 68 UU No.8 Tahun 1981 ditentukan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu PP 27/1983 dan Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2004 juga mengaturnya.

Jaminan perlindungan anak yang tersangkut tindak pidana dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 UU No.8 Tahun 1981 sebagai tersangka atau terdakwa adalah:

- a. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan dengan segera oleh penyidik (Pasal 50 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- b. Hak tersangka perkaranya segera dijatuhkan kepengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Hal.161

- c. Hak tersangka segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3) UU No.8 tahun 1981)
- d. Hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan dan diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a UU No.8 Tahun 1981)
- e. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b UU No.8 Tahun 1981)
- f. Pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 UU No.8 Tahun 1981)
- g. Hak tersangka untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981), dan dalam hal tersangka bisu atau tuli diangkat seorang penerjemah (Pasal 53 ayat (2) jo Pasal 178 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- h. Hak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukumnya selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 UU No.8/ 1981)
- i. Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat penasihat hukum yang ditunjuk dalam hal tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, karena disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati, pidana 15 tahun atau lebih atau bagi tersangka tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih maka berhak mendapat



bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1981)

- j. Hak tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- k. Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 UU No.8 Tahun 1981)
- l. Hak tersangka atau terdakwa untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya pada semua tingkat pemeriksaan kepada keluarganya (Pasal 59 UU No.8 Tahun 1981)
- m. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga guna mendapatkan jaminan bagi penagguhan atau usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 UU No.8 Tahun 1981)
- n. Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima keluarga dalam kaitan kepentingan pekerjaan (Pasal 62 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- o. Hak tersangka atau terdakwa mengirim surat kepada penasihat hukum dan menerima surat dari penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- p. Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 UU No.8 Tahun 1981)
- q. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan atau mengajukan saksi atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang dapat menguntungkannya (pasal 65 UU No.8/ 1981)

- r. Hak tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 UU No.8 Tahun 1981)
- s. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 UU No.8 Tahun 1981)

Disamping hak-hak bersifat umum dalam UU No.8 Tahun 1981 tersebut, penjabaran dan pelaksanaan serta penerapan hak itu diatur secara lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Didalamnya juga diatur hal yang berhubungan dengan tata tertib pelaksanaan hak menerima kunjungan dan pelayanan perawatan tahanan. Adapun hak-hak tersebut adalah :

- a. Hak atas perawatan kesehatan, meliputi perawatan rutin dirumah sakit, tahanan yang meninggal dunia dalam rutan
- b. Hak atas perawatan rohani, meliputi fasilitas dan sarana pendidikan, fasilitas keagamaan, fasilitas sarana olahraga dan kesenian
- c. Larangan wajib kerja
- d. Hak mendapat kunjungan

Jaminan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 8 UU 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”



## **2. Perlindungan Anak Dalam Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).**

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak meliputi :

- a. Hak anak yang belum mencapai umur 8 tahun untuk diserahkan kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya untuk dibina. Jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka diserahkan kepada departement sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No.3 Tahun 1997).
- b. Hak untuk tetap diajukan kesidang pengadilan anak, meskipun melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota ABRI (Pasal 7 UU No.3 Tahun 1997)
- c. Hak diperiksa dalam sidang tertutup kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.3 Tahun 1997)
- d. Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika dilakukan pemberitaan proses perkara sejak penyidikan sampai saat sebelum mengucapkan putusan pengadilan (Pasal 8 ayat (5) UU No.3 Tahun 1997)
- e. Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, penyidikan tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (Pasal 42 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997)
- f. Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (Pasal 42 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997)

- g. Penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus untuk anak diLingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau tempat tertentu (Pasal 44 ayat (6) UU No. 3 Tahun 1997)
- h. Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan (Pasal 45 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997)
- i. Hak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan (Pasal 51 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997)
- j. Hak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan tanpa diawasi, tanpa didengar oleh pejabat berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (Pasal 51 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997)

Dari sekian banyak hal tersebut, maka hanya akan dikaji masalah pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sesuai Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa :

1. Setiap anak sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
2. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh mengenai hak memperoleh bantuan hukum
3. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.



Dari konteks diatas, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam perkara pidana, terutama hak pemberian bantuan hukum, dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan. Konsekuensi logisnya bagi penyidik, penuntut umum dan hakim, mereka wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, orang tuanya atau walinya atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

Untuk itu dalam konteks adanya pemberian bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan harus memperhatikan kepentingan anak, kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan penasihat hukum harus memperhatikan pendapat petugas kemasyarakatan (Penjelasan Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Idealnya pemberian bantuan hukum dilakukan oleh penasihat hukum yang mempunyai minat, perhatian dan dedikasi terhadap anak sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan kepada penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak, yaitu :

1. Telah berpengalaman sebagai penasihat hukum
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Menurut penjelasan Pasal 10 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dan memahami masalah anak adalah memahami :

- 1) Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif.

- 2) Pertumbuhan dan perkembangan anak
- 3) Berbagai tata nilai yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi.

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukumnya dengan diawasi tapi tidak didengar pembicaraannya. Diawasi berarti dilihat, diamati, diperhatikan dari jarak tertentu oleh petugas. Maksudnya agar pertemuan itu tidak disalah gunakan tersangka atau terdakwa. Ketentuan petugas pemasyarakatan berhubungan langsung dengan anak yang ditangkap atau ditahan.

### **3. Perlindungan Anak Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999).**

Pada Pasal 56 sampai Pasal 66 Undang-undang No.39 Tahun 1999 diatur tentang hak anak pada dasarnya, khusus perlindungan hak anak yang berhubungan dengan Pasal 66 Undang-undang No.39 Tahun 1999 diatur sebagai berikut :

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum
- 4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir



- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Pengaturan hak anak didalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 56 sampai Pasal 66 Undang-undang No.39 Tahun 1999 berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap WANITA, Konvensi PBB Tentang Hak-hak Anak dan berbagai instrumen internasional lainnya tentang HAM.

#### **4. Perlindungan Anak Dalam Undang-undang Perlindungan Anak (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002).**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (LNRI 2002-19;(LNRI4235)) tentang perlindungan anak terdiri dari 14 Bab dan 93 Pasal, diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Karena itu penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD RI 1945 serta prinsip-prinsip dasar hak-hak Konvensi Hak Anak yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 23 Undang-undang No.23 Tahun 2002).

Dengan titik tolak demikian maka ditentukan hak dan kewajiban anak. Adapun Hak Anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa :

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 UU No.23 Tahun 2002)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan serta beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 5 dan Pasal 6 UU No.23 Tahun 2002)
- c. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU No.23 / 2002 )



- d. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sedangkan khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial (Pasal 9 ayat (1) dan (2), dan Pasal 12 UU No.23 Tahun 2002)
- e. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberi informasi serta berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi demi pengembangan diri (Pasal 10 dan 11 UU No.23 /2002)
- f. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomis maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002)
- g. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri dan berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan dalam peperangan (Pasal 14 dan Pasal 15 UU No.23 tahun 2002)
- h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, kemudian memperoleh kebebasan sesuai hukum serta penangkapan, penahanan atau tindak pidana hanya dilakukan apabila

sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (1), (2), (3) UU No.23 Tahun 2002).

- i. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c, dan Pasal 18 UU No.23/2002)

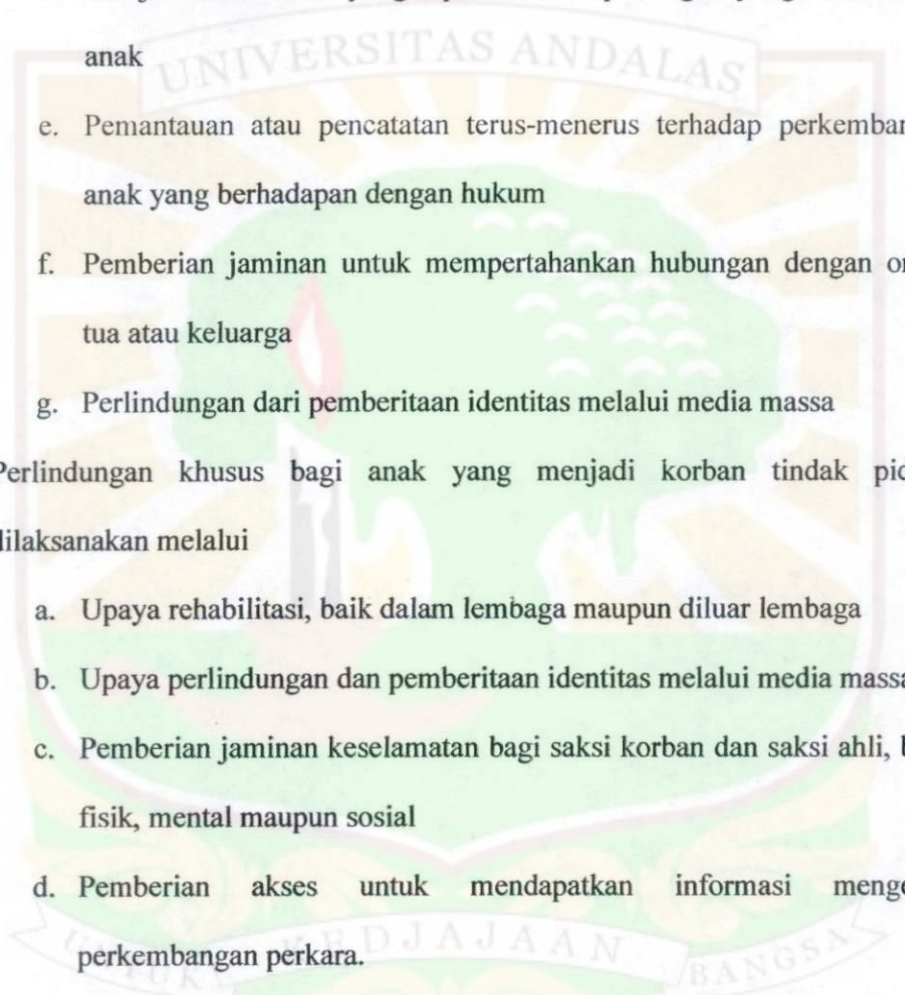
Kemudian menurut Pasal 19 UU No.23 Tahun 2002 ditentukan pula bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- b. Menghormati orang tua, wali dan guru
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Selain itu penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pada dasarnya perlindungan itu meliputi agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Selain perlindungan tersebut, berdasarkan bagian kelima Pasal 64 UU No.23 Tahun 2002, juga diatur perlindungan khusus bagi anak. Salah satu aspek perlindungan khusus tersebut menurut Pasal 64 ayat (2), (3) UU No.23/2002 :

- I. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :



- 
- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
  - d. Menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
  - e. Pemantauan atau pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
2. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
  - b. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa
  - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial
  - d. Pemberian akses untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### **D. Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak .**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-undang Pemasyarakatan) diberikan pengertian bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan

pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sehubungan dengan itu dalam Undang-undang Pemasyarakatan telah memberikan batasan mengenai sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah, batas dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 angka 2 UU no.12 Tahun 1995)

Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan dinegara kita sesuai dengan pengertian diatas berdasarkan Pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Padmo Wahjono, 1981, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, Hal.26



Pengertian Lembaga Pemasyarakatan sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-undang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian ini dapat diketahui tentang perincian siapa yang dibina oleh LAPAS yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tidak dipergunakan istilah narapidana untuk anak tetapi menggunakan istilah anak didik pemasyarakatan.<sup>22</sup> Maka Undang-undang juga konsekuen untuk membedakan tempat pembinaannya, narapidana pembinaannya ditempatkan di LAPAS sedangkan anak didik pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS Anak.

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan atas suatu asas yang merupakan pegangan bagi para pembina agar tujuan pembinaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Untuk itu Pasal 6 Undang-undang Pemasyarakatan mengenal 7 asas sistem pembinaan pemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Pengayoman

Asas ini dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum dan narapidana selama mereka menjalani pidananya di LAPAS karena sebagai warga binaan mereka harus dilindungi.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas ini dimaksudkan agar para pembina pemasyarakatan memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama terhadap warga binaannya tanpa membedakan orangnya.

---

<sup>22</sup> Gorys Keraf, 1986, *Diksi Dan Gaya Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia, Hal.132

### 3. Pendidikan

Dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana dengan dasar mendidik dan membimbing mereka. Pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antarlain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

### 4. Pembimbingan

### 5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga yang dibina sebagaimana layaknya manusia. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya. Apabila hal ini dilalaikan, maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia.

### 6. Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan

Asas kehilangan kemerdekaan ini merupakan satu-satunya penderitaan menurut penjelasan Undang-undang, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama berada didalam LAPAS inilah yang merupakan kehilangan kemerdekaannya artinya ia tidak bebas untuk pergi kemana-mana ataupun melakukan kegiatan apapun. Penderitaan itu tidak boleh ditambah sewaktu berada di LAPAS karena selama di LAPAS tujuannya untuk memperbaiki kesalahannya. Walaupun



kehilangan kemerdekaannya sebagaimana yang dimaksud, akan tetapi hak perdatanya tetap dilindungi di LAPAS seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, atau olahraga.

7. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu.

Selama narapidana mendapat pembinaan di LAPAS mereka tetap dijamin hak nya untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pada prinsipnya untuk membina narapidana tidak boleh diasingkan sama sekali dengan masyarakat.

Dengan asas-asas tersebut pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, diharapkan dapat tercapai fungsi pemasyarakatan dalam membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga setelah keluar dari LAPAS mereka dapat diterima lagi oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) didalam Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995). Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, anak pidana, anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas

---

<sup>23</sup> Gatot Supramono, op. cit, Hal.119

- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan biayanya menjadi tanggung jawab negara
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Untuk itu harus ada permintaan dari orang tua atau wali tersebut kepada BAPAS.

Pembinaan dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (didalam LAPAS) dan ekstramural (diluar LAPAS). Pembinaan ekstramural dikenal juga dengan nama:

- a. Assimilasi yaitu proses pembinaan warga binaan pemasarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya kedalam kehidupan masyarakat.
- b. Integrasi yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Bagi anak yang ditempatkan di LAPAS Anak, terlebih dahulu dilakukan pendaftaran yakni :

- a. Pencatatan tentang putusan pengadilan, seperti jati diri, barang dan uang yang dibawa



- b. Pemeriksaan kesehatan
- c. Pembuatan pas photo
- d. Pengambilan sidik jari
- e. Pembuatan acara serah terima

Dari masing-masing jenis anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak pembinaannya disesuaikan seperti anak pidana dititik beratnya pada program tata tertib pembinaan dan jenis kegiatan tertentu. Dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Anak Negara titik berat pembinaannya adalah pada pendidikan, sedangkan Anak Sipil titik berat pembinaannya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan anak yang bersangkutan (Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

Disamping program pembinaan yang ditentukan untuk masing-masing jenis anak, dalam pembinaan juga diadakan penggolongan bagi anak didik pemasyarakatan, bagi Anak Pidana penggolongan didasarkan atas :

1. Umur
2. Jenis kelamin
3. Lama pidana
4. Jenis kejahatan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Untuk Anak Negara, penggolongannya didasarkan atas :

1. Umur
2. Jenis kelamin
3. Lama pemidanaan yang dijatuhkan
4. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Sedangkan untuk Anak Sipil penggolongannya didasarkan atas :

1. Umur
2. Jenis kelamin
3. Lama pembinaan
4. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam melaksanakan program pendidikan bagi Anak Negara, seharusnya setiap LAPAS Anak dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan. Jika tidak terdapat fasilitas pendidikan maka Anak Negara diikut sertakan pada pendidikan diluar LAPAS Anak. Hal tersebut adalah karena pendidikan bagi Anak negara (Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).

Adapun wujud pembinaan bagi Anak Negara dilakukan dengan pentahapan dalam waktu 6 bulan (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999) yaitu :

- a. Pembinaan tahap awal
- b. Pembinaan tahap lanjutan
- c. Pembinaan tahap akhir



Adapun wujud pembinaan bagi Anak Negara meliputi :

1. Pendidikan agama dan budi pekerti
2. Pendidikan umum
3. Pendidikan Kepramukaan
4. Latihan keterampilan

Sedangkan untuk anak yang diputus oleh hakim untuk diserahkan ke Departement Sosial Kemasyarakatan dalam Surat Keputusan Mentri Kehakiman wajib ditunjuk tempat pelaksanaan pendidikan, pembinaan atau latihan kerja tersebut (Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Oleh karena itu dalam menentukan pembinaan bagi anak nakal pada tahap proses peradilan pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial kemasyarakatan membantu memperlancar proses peradilan pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial kemasyarakatan membantu memperlancar proses peradilan dalam hal melakukan penelitian kemasyarakatan.

## **E. Hak-hak Anak Didalam Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Hak-hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Kalau membicarakan tentang hak-hak narapidana, tidak bisa dilepaskan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak kodrat yang dibawa manusia semenjak lahir. Oleh sebab itu, hak tersebut tidak boleh dicabut ataupun dilanggar. Begitupula dengan narapidana yang juga adalah manusia yang dijatuhkan pidana oleh pengadilan sehingga membatasi kemerdekaannya secara

bebas. Walaupun dia dipidana oleh pengadilan, tetapi sebagai manusia hak-haknya yang lain tidak menjadi hilang karenanya.

Mengenai hak-hak narapidana dapat dilihat dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa hak-hak narapidana adalah :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Pengurangan masa menjalani pidana bagi narapidana yang berkelakuan baik sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) Kepres RI No.5 Tahun 1987, dilakukan dengan perhitungan :

1. Narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 bulan sampai 12 bulan memperoleh pengurangan selama 1 bulan
2. Bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih ditentukan :
  - a. Pada tahun pertama memperoleh pengurangan 2 bulan
  - b. Pada tahun kedua memperoleh pengurangan 3 bulan
  - c. Pada tahun ketiga memperoleh pengurangan 4 bulan
  - d. Pada tahun keempat dan kelima memperoleh pengurangan 5 bulan
  - e. Pada tahun keenam dan seterusnya memperoleh pengurangan 6 bulan

Pemberian pelepasan bersyarat dan cuti menjelang lepas ini yang berwenang memberikannya adalah Menteri Hukum dan HAM, yang akan diberikan kepada mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu telah menjalani pidana  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya dan berkelakuan baik selama berada dalam lembaga pemasyarakatan.

## **2. Hak-hak Anak Dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak**

Undang-undang membatasi Anak Pidana dalam pendidikan pada LAPAS Anak sampai usia 18 tahun demikian pula Anak Negara. Adapun hak mereka selama berada di LAPAS Anak, mereka berhak memperoleh pendidikan dan

latihan kerja, disamping hak yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-undang No.12 Tahun 1995.

Adapun hak-hak selama berada didalam LAPAS Anak menurut Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan :

- a. Hak untuk melaksanakan ibadah
- b. Hak untuk mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani
- c. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
- e. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat
- f. Hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas
- g. Dan lain-lain yaitu sebagaimana yang disebut dalam Pasal 51 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan :
  - 1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya
  - 2) Hak politik bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya
  - 3) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak anak yang timbul dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu :<sup>24</sup>

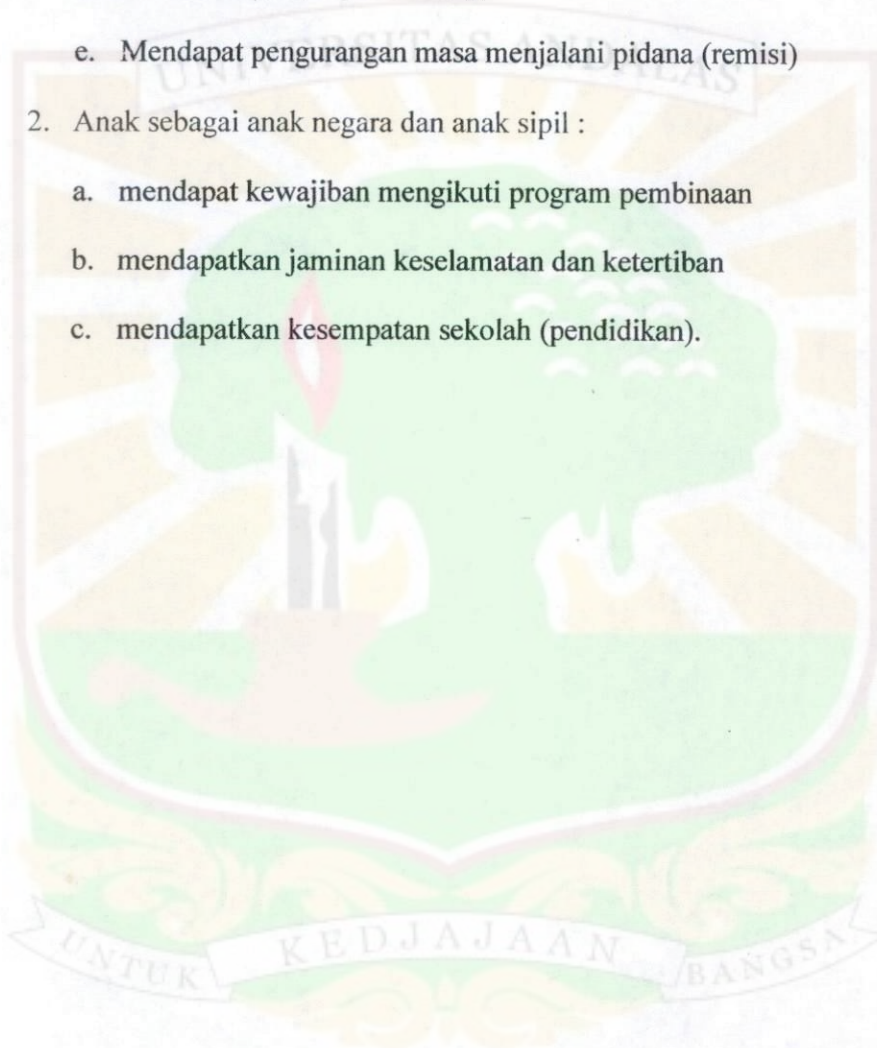
1. Anak Sebagai Narapidana :

---

<sup>24</sup> Maulana Hasan Wadong, op. cit, Hal 79



- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
  - b. Mendapat perawatan baik jasmani maupun rohani
  - c. Mendapatkan kesempatan untuk sekolah (pendidikan dan pengajaran)
  - d. Menerima kunjungan keluarga
  - e. Mendapat pengurangan masa menjalani pidana (remisi)
2. Anak sebagai anak negara dan anak sipil :
- a. mendapat kewajiban mengikuti program pembinaan
  - b. mendapatkan jaminan keselamatan dan ketertiban
  - c. mendapatkan kesempatan sekolah (pendidikan).



### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk-bentuk Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.**

Masalah perlindungan terhadap hak-hak anak, baik dari segi hukum maupun perkembangan fisik dan mental anak dalam menjalani pidana haruslah selalu diperhatikan demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak.

Untuk mengetahui perlindungan apa saja yang telah diberikan didalam melakukan pembinaan terhadap anak nakal atau anak yang sedang menjalani proses pidana, terlebih dahulu kita harus melihat bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong, khususnya terhadap narapidana anak.

Adapun bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong, yaitu berupa :<sup>25</sup>

#### **1. Pembinaan Pendidikan Agama**

Setiap terpidana anak di Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban mengikuti pendidikan agama sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, bagi narapidana anak yang bergama Islam, pendidikan agama diberikan hampir sama dengan pendidikan pesantren pada umumnya yaitu berupa ceramah agama, membaca kitab suci Al-Quran, ilmu pengetahuan tentang agama, dan

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sri Harmowo.S,Bc.IP,SH, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara tanggal 18 Oktober 2010, jam 10.00 WIB di Ruang Binadik



menjalankan ibadah. Pendidikan agama khusus anak dilakukan setiap sore pada hari Senin s/d Jum'at dari jam 14.00 WIB s/d 15.30 WIB.

Khusus narapidana anak yang beragama Kristen dan agama lainnya, kegiatan keagamaan diadakan setiap hari Minggu pagi, disamakan dengan narapidana dewasa dan dipimpin oleh Pastor atau Pendeta yang didatangkan dari Gereja dan juga diadakan kegiatan Natal dan Tahun Baru bersama.

## 2. Pembinaan Pendidikan Umum

Setiap narapidana anak mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan umum yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, kecuali narapidana anak yang sedang menjalani hukuman disiplin dan yang sedang sakit. Kesempatan mengikuti pendidikan dilakukan pada setiap anak dimana pendidikan umum bagi anak dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan kemampuan keluarganya yaitu

- a. Bagi keluarga yang kurang mampu, di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong diselenggarakan Paket A dan Paket B
- b. Bagi keluarga yang mampu, pendidikan umum dilaksanakan diluar Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong dengan mengikuti prosedur Lembaga Pemasyarakatan baik itu tingkat SD, SLTP, dan SLTA.

Program ini dapat berjalan dengan baik berkat kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong.

### 3. Pembinaan Kursus Keterampilan

Karena sifat anak adalah bermain, rekreasi dan mengikuti wajib sekolah, maka keterampilan untuk narapidana anak kurang diperhatikan. Keterampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong diberikan kepada narapidana dewasa, keterampilan tersebut meliputi meubler (pertukangan kayu), las listrik, las karbit, pertanian dan menjahit.

### 4. Rekreasi

Rekreasi yang diberikan kepada Narapidana anak adalah nonton Televisi (TV) dan bermain.

### 5. Olah Raga

Kepada semua narapidana diberikan kesempatan berolah raga, begitu juga terhadap narapidana anak. Bentuk olahraga khusus untuk narapidana anak adalah SKJ (Senam Kesegaran Jasmani), tenis, catur, dan halma.

### 6. Kesenian

Bentuk kesenian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong adalah bermain alat musik, seperti gitar.



## **B. Perlindungan Hak-Hak Narapidana Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.**

Perlindungan hak-hak narapidana anak yang telah diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong yaitu :<sup>26</sup>

1. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan pemisahan penempatan bagi narapidana anak yang dipisahkan dari narapidana dewasa, hal ini terlihat dengan adanya penempatan ruangan khusus bagi anak yang sedang menjalankan proses pidana. Ruangan ini berbentuk paviliun yang telah dipisahkan dengan paviliun Dewasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemerasan, kekerasan terhadap anak, ancaman terhadap anak, penganiayaan dan penyimpangan lainnya. Hal ini telah sesuai dengan pelaksanaan dari Pasal 17 ayat (1) butir a UU No.23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa " Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong terhadap anak yang sedang menjalankan proses pidana memang sudah ada bantuan hukum yang diterima oleh anak, yaitu sebuah lembaga yang dinamakan Balai Pemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi anak yang sedang menjalankan proses pidana tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong hanya memberikan bantuan

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sri Harmowo.S,Bc.IP,SH, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara tanggal 18 Oktober 2010, jam 10.45 WIB di Ruang Binadik

hukum terhadap anak yang sedang dalam tahap proses persidangan saja, sedangkan pada tahap penyelidikan dan penyidikan tidak didampingi oleh Balai Pemasyarakatan. Hal ini belum sesuai dengan pelaksanaan Pasal 17 ayat 1 butir 2 UU No. 23 Tahun 2002

2. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong telah membantu dan mengupayakan narapidana anak untuk bebas beristirahat, bermain, berekreasi dengan menonton TV, berkumpul, berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan memperoleh sarana bermain. Hal ini telah sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 Pasal 16 ayat (2) yaitu "Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum". Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan menurut Pasal 56 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 yaitu "Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai tahapan usia anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya, serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan".
3. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan hak-hak terhadap narapidana anak untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan mendapat pendidikan agama yang dilakukan setiap sore pada hari Senin s/d Jumat dari jam 14.00 s/d 15.00 WIB, khusus bagi narapidana yang beragama kristen dan agama lainnya kegiatan keagamaan diadakan setiap hari Minggu pagi disamakan dengan Narapidana dewasa yang



dipimpin oleh Pastor atau Pendeta yang didatangkan dari gereja, mendapat perawatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh dokter pemasyarakatan di poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan diselenggarakannya Paket A dan Paket B bagi narapidana anak, dapat menyampaikan keluhan kepada petugas pemasyarakatan, mendapat bahan bacaan dan menonton TV, mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan bagi narapidana anak dan dewasa, menerima kunjungan dari keluarga, dan mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Hal ini telah sesuai dengan UU No 12 tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) yaitu “setiap narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama nya, mendapat perawatan, mendapat pendidikan, mendapat pelayanan kesehatan, menyampaikan keluhan, mendapat bahan bacaan, mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan, menerima kunjungan keluarga, mendapat pengurangan masa pidana, mendapat pembebasan bersyarat, dan mendapat hak-hak lain sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Untuk melindungi kesehatan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong telah menyediakan fasilitas kesehatan yaitu berupa Poliklinik dan satu orang Dokter Pemasyarakatan. Poliklinik dibuka setiap hari kecuali hari libur nasional dan hari besar keagamaan, tetapi pada saat darurat poliklinik ini siap melayani pada malam hari..<sup>27</sup> Hal ini telah sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 Pasal 8 yaitu “Setiap anak berhak memperoleh

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sri Harmowo.S,Bc.IP,SH, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara tanggal 18 Oktober 2010, jam 11.30 WIB di Ruang Binadik

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

### **C. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.**

Dalam melakukan perlindungan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Hal ini disebabkan karena narapidana anak ini lebih peka daripada narapidana dewasa dan secara psikologis khusus narapidana anak harus sering diadakan pendekatan-pendekatan dalam pembinaannya. Oleh karena itu perlulah selalu diperhatikan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong adalah<sup>28</sup> :

#### **1. Terhadap Petugas itu Sendiri.**

Didalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak tidak sama dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa. Untuk itu sangat diperlukan petugas yang cakap dan terampil serta mengetahui wawasan yang luas karena petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan seorang pembina yang menjadi contoh teladan yang baik bagi anak didiknya.

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sri Harmowo.S,Bc.IP,SH, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara tanggal 18 Oktober 2010, jam 11.55 WIB di Ruangan Binadik



Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong tidak ada petugas yang khusus dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak, padahal terhadap anak yang rusak mental dan moralnya dibutuhkan tenaga profesional seperti tenaga ahli dan ahli seperti seseorang yang mengerti tentang psikologis anak. Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong tidak tersedia petugas Psikolog anak.

## 2. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam terbentuknya pola pikir kehidupan setiap manusia, oleh sebab itu dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak haruslah memperhatikan lingkungan sekitarnya. Salah satunya dengan memisahkan ruangan narapidana anak dengan narapidana dewasa, pemisahan ini dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong agar anak yang sedang dalam pembinaan yang telah rusak mental maupun moralnya tidak diperparah lagi dengan hadirnya narapidana dewasa. Namun masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kabupaten Rejang Lebong kurang peduli terhadap narapidana anak.

Adanya pandangan negatif ditengah-tengah masyarakat terhadap pelaku tindak pidana apalagi bekas warga binaan, sehingga anak yang awalnya telah baik tetapi masyarakat masih menganggap anak tersebut bekas narapidana atau anak nakal dan kebanyakan dari mereka menganggap bahwa narapidana itu orang jahat sehingga membuat anak tersebut sulit untuk kembali ketengah-tengah kehidupan masyarakat yang damai dan akan mempengaruhi mental anak untuk kembali berbuat kejahatan lagi. Hal ini terlihat dengan adanya narapidana anak yang

paling banyak dan selalu melakukan tindakan pencurian dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ini dengan adanya data jumlah narapidana anak yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.

**Data Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010.**

**Jumlah Penghuni Narapidana Anak Tahun 2005**

**Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong**

No	Pasal / UU yang dilanggar	Jumlah Napi Anak	Keterangan
1	351 KUHP	4 orang	AP
2	372 KUHP	1 orang	AP
3	362 KUHP	8 orang	AP
4	338 KUHP	2 orang	AP
	Jumlah	15 orang	AP

**Sumber Data : Lapas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010**

**Jumlah Penghuni Narapidana Anak Tahun 2006**

**Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong**

No	Pasal / UU yang dilanggar	Jumlah Napi anak	Keterangan
1	362 KUHP	12 orang	AP
2	285 KUHP	1 orang	AP
	Jumlah	13 orang	AP

**Sumber Data : Lapas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010**



**Jumlah Penghuni Narapidana Anak Tahun 2007**

**Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong**

No	Pasal / UU yang dilanggar	Jumlah Napi anak	Keterangan
1	351 KUHP	2 orang	AP
4	362 KUHP	22 orang	AP
5	285 KUHP	1 orang	AP
6	289 KUHP	1 orang	AP
	Jumlah	26 orang	AP

**Sumber Data : Lapas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010**

**Jumlah Penghuni Narapidana Anak Tahun 2008**

**Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong**

No	Pasal / UU yang dilanggar	Jumlah Napi anak	Keterangan
1	351 KUHP	3 orang	AP
3	359 KUHP	1 orang	AP
4	362 KUHP	16 orang	AP
5	368 KUHP	1 orang	AP
	Jumlah	21 orang	AP

**Sumber Data : Lapas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010**

**Jumlah Penghuni Narapidana Anak Tahun 2009**

**Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong**

No	Pasal / UU yang dilanggar	Jumlah Napi anak	Keterangan
----	---------------------------	------------------	------------

1	359 KUHP	2 orang	AP
2	362 KUHP	23 orang	AP
	Jumlah	25 orang	AP

**Sumber Data : Lapas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010**

### **Jumlah Penghuni Narapidana Anak Tahun 2010**

**Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong**

No	Pasal / UU yang dilanggar	Jumlah Napi anak	Keterangan
1	351 KUHP	1 orang	AP
2	362 KUHP	14 orang	AP
3	480 KUHP	1 orang	AP
4	338 KUHP	2 orang	AP
	Jumlah	18 orang	AP

**Sumber Data : Lapas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010**

**Keterangan :**

AP = Anak Pidana

AN = Anak Negara

AS = Anak Sipil

Adapun salah satu contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat di Lampiran



### 3. Sarana

Untuk terwujudnya perlindungan hak-hak anak yang sedang menjalankan hukuman pidananya, perlu adanya sarana yang baik demi terwujudnya perlindungan hukum secara optimal. Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong sarana yang dimiliki untuk membina anak ke arah yang lebih baik masih jauh dari yang diharapkan, seperti kurang tersedianya fasilitas bermain untuk narapidana anak serta sarana kesenian yang minim sehingga petugas sulit untuk membina bakat seni narapidana anak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup dalam bab terakhir ini penulis akan mengambil suatu kesimpulan dari semua yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini. Kemudian penulis juga akan mengembangkan pula saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mencapai perlindungan dalam lingkungan hukum perlindungan anak, khususnya perlindungan hukum terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan.

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bentuk-bentuk pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong berupa pembinaan pendidikan agama, pendidikan umum, pembinaan kursus keterampilan, rekreasi, olah raga, dan kesenian. Namun kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana anak antara lain kurangnya sarana dan prasarana seperti sarana kesenian yang minim sehingga petugas sulit untuk membina bakat seni narapidana anak.
2. Bentuk perlindungan hak-hak Narapidana Anak yang telah diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong berupa Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong telah memperlakukan Narapidana Anak secara manusiawi dan penempatannya telah dipisahkan dari orang dewasa, dan telah mengupayakan Narapidana Anak untuk babas beristirahat, bermain, mendapatkan pendidikan dan pengurangan masa pidana, serta telah



disediakannya fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dan Dokter Pemasyarakatan

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi anak dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong antara lain kurang tersedianya fasilitas bermain untuk narapidana anak. Hal ini ditambah lagi dengan tidak adanya tenaga pegawai yang profesional dan mengerti psikologis dari anak sehingga banyak anak yang telah selesai menjalani hukumannya kembali lagi menjadi anak yang nakal dan tidak menyesali perbuatannya, menyebabkan bertambah buruknya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam menjalani pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong. Masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kabupaten Rejang Lebong kurang peduli terhadap narapidana anak. Adanya pandangan negatif ditengah-tengah masyarakat terhadap pelaku tindak pidana apalagi bekas warga binaan, sehingga anak yang awalnya telah baik tetapi masyarakat masih menganggap anak tersebut bekas narapidana atau anak nakal membuat anak tersebut sulit untuk kembali ketengah-tengah kehidupan masyarakat yang damai.

## **B. SARAN**

Melihat fenomena yang terjadi terhadap perlindungan hukum bagi anak yang sedang menjalani proses pembedaan sangatlah memprihatinkan, untuk itu saran penulis terhadap Lembaga Pemasyarakatan antara lain :

1. Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong haruslah dilakukan Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan Narapidana Anak seperti parasarana pendidikan, kesenian, kesehatan, sarana bermain anak dan lainnya demi terciptanya perlindungan yang baik bagi anak yaitu baik dari segi fisik, psikologis maupun moral dari si anak.
2. Di lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong dalam pelaksanaannya haruslah diberikan bantuan hukum terhadap anak yang sedang menjalankan proses pidana untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Narapidana Anak
3. Dalam pelaksanaan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong haruslah lebih memperhatikan psikologi dari si anak dengan menyediakan petugas psikolog anak, dan diharapkan kepada semua pihak yaitu Petugas LAPAS, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong sama-sama ingin mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak secara maksimal demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Zakiah Daradjat, *Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Soedjono Dirjosisworo, *Sejarah Dan Asas-asas Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1984.
- Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Paulus Hadisupropto, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Padmo Wahjono, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Gorys Keraf, *Diksi Dan Gaya Bahasa*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Hak-Hak Anak

**C. Internet**

1. [www.google.com](http://www.google.com) / *Laporan Unicef Indonesia.*

**E. Media Cetak**

1. Koran Kompas Tanggal 6 Juli 2008





## UNTUK Keadilan

## TUNTUTAN PIDANA

NO.REG.PERKARA: PDM -50 /CURUP/05/2010

Kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Curup, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara :

1. Nama lengkap terdakwa : M. PRAMA SUTANZA als BRAM bin A. RONI IRAWAN  
 Tempat lahir : Curup  
 Umur/ tanggal lahir : 15 tahun/ 19 September 1994  
 Jenis kelamin : laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Kel. Kepala Siring Kecamatan Curup tengah  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pelajar  
 Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap terdakwa : NADRIAN SAPUTRA als RIAN BC bin ABU BAKAR  
 Tempat lahir : Curup  
 Umur/ tanggal lahir : 17 tahun/ 12 Desember 1992  
 Jenis kelamin : laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Stadion Air Bang Kel. Banyu Mas Kecamatan Curup Tengah  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pengamen  
 Pendidikan : SD
3. Nama lengkap terdakwa : ANDI bin HERI EFENDI  
 Tempat lahir : Curup  
 Umur/ tanggal lahir : 15 tahun/ 06 Nopember 1994  
 Jenis kelamin : laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Kel. Kepala Siring Kecamatan Curup tengah  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pelajar  
 Pendidikan : SMP

Berdasarkan surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Curup, nomor : 50 : /pen.pid/An/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa nomor: 51 /TP/05/2010 tanggal 24 Mei 2010, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. M. PRAMANA SUTANZA als BRAM bin A. RONI IRAWAN, Terdakwa 2. ANDRIAN SAPUTRA als RIAN BC bin ABU BAKAR, dan terdakwa 3. ANDI bin HERI EFENDI bersama Sdr. LEO (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama, pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010, bertempat di Simpang Empat Pasar Bang Mego Kelurahan kepala Siring kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang lebong atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit Hand Phone Nokia type 1202 warna biru yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Riki Aditama atau setidaknya selain mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi korban akan ke Bang Mego menitip sepeda Motor kepada terdakwa M. PRAMANA SUTANZA, akan tetapi setelah saksi korban pergi timbul niat dari Leo untuk membongkar jok sepeda motor milik saksi korban, lalu Sdr. Leo dan terdakwa Andrian Saputra als RIAN BC mengangkat Jok sepeda motor sedangkan terdakwa M. PRAMANA SUTANZA memasukkan tangannya ke dalam Jok sepeda motor dan berhasil mengambil 1 (satu) unit hand Phone merk Nokia type 1202 warna bitu, empat batang rokok dan uang sebesar Rp. 2.000,- sedangkan terdakwa ANDI bin HERI EFENDI bertugas mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian. Setelah berhasil para terdakwa pergi ke arah jalan Dodon dan saat itu terdakwa M. PRAMANA SUTANZA membagikan empat batang rokok yang telah berhasil diambil, masing-masing 1 (satu) batang rokok sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone dipegang oleh terdakwa M. PRAMANA SUTANZA.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.200.000.( dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 ayat(1) ke-4, KUHP.

Atas dakwaan penuntut umum terdakwa telah mengerti dan tidak akan melakukan pembelaan atau Eksepsi.-----

Fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa :-----

#### I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. Saksi RIKI ADITAMA BIN SUTRISNO, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa benar saksi memeriksa karena telah terjadi perkara pencurian hand Phone milik saksi.
  - Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at Tanggal 16 April 2010 sekira jam 09.00 Wib di Belakang Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang,
  - Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya akan tetapi saksi mengetahui kalau terdakwa yang melakukan karena saksi mendapatkan Hand Phone tersebut dari saksi Beni yang mengatakan bahwa Handphone saya ada pada Muhamad Pramana Sutanza.
  - Bahwa benar pada hari jumat tanggal 16 April 2010 sekira jam 09.00 wib, saksi ke bang Mego kemudian saksi menitipkan Sepeda motor saksi kepada Terdakwa Barm dkk, dimana didalam jok motor saksi terdapat Hand Phone nokia type 1202 warna biru. Berikut rokok empat batang dan uang tunai Rp. 2.000,-
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil Hand Phone tersebut..
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)  
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa
2. Saksi ARI ANGGARA bin RIZAL, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa benar saksi memeriksa karena telah terjadi perkara pencurian hand Phone milik saksi Riki.
  - Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at Tanggal 16 April 2010 sekira jam 09.00 Wib di Belakang Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang,
  - Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya akan tetapi saksi mengetahui kalau terdakwa yang melakukan karena saksi mendapatkan Hand Phone tersebut dari saksi Kris, yang mana pada tanggal 22 April 2010 saksi Kris mencari Bram akan tetapi Bram tidak ada kemudian saksi Kris menitipkan Hand phone tipe 1202 untuk diberikan kepada tersangka Bram karena saksi Kris mau tutup Kounter, saat saksi mengeluarkan Hand Phone dari saku celana diambil oleh saksi Beni dan saksi Beni mengatakan itu hand phone milik Riki. Akhirnya Hand phone tersebut dibawa oleh saksi Beni "



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil Hand Phone tersebut..
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Riki mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi KRISTOPER KOSTA bin AFONG , memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan. pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa benar saksi periksa karena telah terjadi perkara pencurian hand Phone milik saksi Riki.
- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at Tanggal 16 April 2010 sekira jam 09.00 Wib di Belakang Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang, -----
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya akan tetapi saksi mengetahui kalau terdakwa yang melakukan karena terdakwa M.Pramana Sutanza als Bram pada tanggal 22 April 2010 pernah numpang ngecas Hnad Phone nokia type 1202 di counter saksi, karena counter mau tutup terdakwa Bram belum datang maka Hand phone tersebut saksi titip sama saksi Anggi untuk diserahkan kepada Bram.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau hand phone tersebut hasil pencurian karena Bram teman saksi sekolah, saksi mengetahui bahwa Hand phone tersebut hasil mencuri setelah Bram ditangkap polisi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil Hand Phone tersebut..
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Riki mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi EFRI AJABENHAR als BENI bin ISLAN , memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya Menerangkan :

- - Bahwa benar saksi periksa karena telah terjadi perkara pencurian hand Phone milik saksi Riki.
- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at Tanggal 16 April 2010 sekira jam 09.00 Wib di Belakang Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang,
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi korban (riki) setelah kejadian mendatangi saksi dan mengatakan kalau Hand phonenya telah hilang dipasar bang Mego dan saksi Riki minta tolong dicarikan orang yang mengambilnya.
- Bahwa benar setelah 1 minggu saksi ada pergi ke Bang Mego untuk mencari para pelaku, dan tanpa sengaja bertemu dengan saksi Anggi yang sedang mengeluarkan hand phone dan hand phone tersebut sama cirinya dengan hand phone Riki yang hilang, lalu saksi mengatakan hand phone siapa dijawab anggi hand phone Bram. Tidak berapa lama datang Bram dan mengatakan bahwa Hand pun tersebut milik Oki, setelah dipertemukan dengan Oki bahwa Hand phone tersebut bukan milik Oki, lalu saksi dan saksi korban melapor ke Polres dan para terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil Hand Phone tersebut..
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Riki mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

## II. KETERANGAN TERDAKWA:

1. terdakwa M.PRAMANA SUTANZA als BRAM bin A. RONI IRAWAN, menarangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa karena telah melakukan pencurian hand Phone milik saksi Riki.



- Bahwa benar terdakwa menerangkan terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at Tanggal 16 April 2010 sekira jam 09.00 Wib di Belakang Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang, -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa ARDIAN SAPUTRA als RIAN BC bin ABU BAKAR, terdakwa ANDI bin HERI EFENDI dan Sdr.LEO (DPO), adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah niat untuk mengambil barang tersebut dari Leo kemudian diikuti oian, terdakwa sedangkan terdakwa Andi berjaga-jaga di Pos Kamling. Dimana saat itu terdakwa Adrian dan Leo mengangkat Jok motor saksi korban sedangkan terdakwa memasukkan tangan ke dalam jok dan berhasil mengambil 1 (unit) hand phone tipe 1202, 4 batang rokok dan uang Rp. 2.000,- setelah itu uang terdakwa kembalikan lagi sedang rokok dibagi 1 satu-satu, Hand Phone untuk sementara terdakwa yang memegang .
- Bahwa benar terdakwa ada numpang ngecas HP nokia tipe 1202 di counter milik saksi Kris.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

2. terdakwa ANDI bin HERI EFENDI, menarangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa karena telah melakukan pencurian hand Phone milik saksi Riki.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at Tanggal 16 April 2010 sekira jam 09.00 Wib di Belakang Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang, -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa M.PRAMANA SUTANZA als BRAM bin RONI IRAWAN, terdakwa ADRIAN SAPUTRA bin ABU BAKAR dan Sdr.LEO (DPO), adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah niat untuk mengambil barang tersebut dari Leo kemudian terdakwa berjaga-jaga di Pos kamling sedangkan ADRIAN SAPUTRA dan LEO mengangkat jok motor sedangkan M.PRAMANA SUTANZA als BRAM memasukkan tangan ke dalam jok untuk mengambil barang-barang yang ada di Jok motor, sedangkan terdakwa Andi berjaga-jaga di Pos Kamling. Setelah berhasil mengambil satu unit hand phone . 4 batang rokok dan uang tunai 2.000,- lalu terdakwa Bram membagikan rokok satu orang satu batang.
- Bahwa benar Hand phone tipe 1202 dipegang oleh Bram.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

3. terdakwa ADRIAN SAPUTRA als RIAN BC bin ABU BAKAR, menarangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa karena telah melakukan pencurian hand Phone milik saksi Riki.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at Tanggal 16 April 2010 sekira jam 09.00 Wib di Belakang Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang, -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa M.PRAMANA SUTANZA als BRAM bin RONI IRAWAN, terdakwa ANDI bin HERI EFENDI dan Sdr.LEO (DPO), adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah niat untuk mengambil barang tersebut dari Leo kemudian terdakwa dan leo mengangkat jok motor sedangkan M.PRAMANA SUTANZA als BRAM memasukkan tangan ke dalam jok untuk mengambil barang-barang yang ada di Jok motor, sedangkan terdakwa Andi berjaga-jaga di Pos Kamling. Setelah berhasil mengambil satu unit hand phone . 4 batang rokok dan uang tunai 2.000,- lalu terdakwa Bram membagikan rokok satu orang satu batang.
- Bahwa benar Hand phone tipe 1202 dipegang oleh Bram.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



### III. BARANG BUKTI.

Barang bukti yang diajukan persidangan berupa : 1(satu) unit Hand Phone Nokia type 1202 berikut kotaknya Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

### IV. ANALISA YURIDIS /PEMBUKTIAN.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampaila kami pada pembuktian mengenai unsure-unsur tindak pidana yang dikawatirkan kepada terdakwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut

#### 1. Unsur " barang siapa":

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini 1. MUHAMAD PRAMANA SUTANZA bin A.RONI IRAWAN, 2. ADRIAN SAPUTRA bin ABU BAKAR , 3. ANDI bin HERI EFENDI yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana, sehingga para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

#### 2. Unsur " mengambil sesuatu barang"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Belakang Pasar Bang Mego Kelurahan Kepala Siring kabupaten Rejang Lebong, mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit Hand Phone Nokia Type 1202 dan rokok sebanyak 4 batang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

#### 3. Unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa barang berupa 1(satu) unit hand phone Nokia type 1202 dan 4 batang rokok tersebut adalah kepunyaan saksi Korban Riki Aditama atau setidak-tidaknya selain terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

#### 4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit hand phone dan 4 batang rokok tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Riki Aditama atau dari siapapun juga, dan barang tersebut terdakwa perlakukan seperti milik terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

#### 5. Unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa saat mengambil Hand Phone milik saksi korban Riki Aditama tersebut dilakukan bersama-sama yaitu oleh terdakwa 1. MUHAMAD PRAMANA SUTANZA bin A.RONI IRAWAN, 2. ADRIAN SAPUTRA bin ABU BAKAR, 3. ANDI bin HERI EFENDI. Dimana saat itu terdakwa Adrian mengangkat jok sepeda motor saksi korban Riki yang sedang parkir di belakang Bang mego, lalu terdakwa M.Pramanan Sutanza memasukkan tangan ke dalam jok dan



berhasil mengambil satu unit hand phone nokia type 1202 dan 4 batang rokok, sedangkan terdakwa Andi bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi.  
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

----- Dengan telah terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa 1. MUHAMAD PRAMANA SUTANZA bin A.RONI IRAWAN, 2. ADRIAN SAPUTRA bin ABU BAKAR, 3. ANDI bin HERI EFENDI cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan kepada terdakwa harus dituntut agar dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.-----

-----Oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan. -----

-----Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa masih anak-anak dan berstatus pelajar

----- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan :-----

**MENUNTUT :**

----- Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMAD PRAMANA SUTANZA bin A.RONI IRAWAN, 2. ADRIAN SAPUTRA bin ABU BAKAR, 3. ANDI bin HERI EFENDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 ayat (1) KE-4 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal kami
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa : 1. MUHAMAD PRAMANA SUTANZA bin A.RONI IRAWAN, 2. ADRIAN SAPUTRA bin ABU BAKAR, 3. ANDI bin HERI EFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 ( satu ) unit hand phone nokia type 1202 berikut kotaknya
  - Dikembalikan kepada saksi Saksi korban Riki Aditama
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah)

----- Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada persidangan hari ini Kamis tanggal 10 Juni 2010.-----

JAKSA PENUNTUT UMUM

  
ELIARMLSH



**Lampiran VII**  
**Jumlah Penghuni Narapidana Anak Tahun 2005 s/d 2010**  
**Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong**

No	Jenis Kejahatan/Pasal Yang melanggar	Tahun 2005			Tahun 2006			Tahun 2007			Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010		
		AP	AN	AS	AP	AN	AS	AP	AN	AS	AP	AN	AS	AP	AN	AS	AP	AN	AS
1	351 KUHP	4	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
2	372 KUHP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	362 KUHP	8	0	0	12	0	0	22	0	0	16	0	0	23	0	0	14	0	0
4	338 KUHP	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
5	285 KUHP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	289 KUHP	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	359 KUHP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
11	368 KUHP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	480 KUHP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Jumlah		15	0	0	13	0	0	26	0	0	21	0	0	25	0	0	18	0	0

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010  
Keterangan : AP = Anak Pidana  
AN = Anak Negara  
AS = Anak Sipil



Nomor : 334/J16.4/KM-RM/2010

Padang, 28 September 2010

Lamp : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka

Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,  
Sdr. Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

Nama : Debby Susanty  
Nomor BP : 06940140  
Prog Kekhususan : Hukum Pidana  
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri.**  
Alamat : Jl. Kesehatan III No.7 Lapai Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 28 September 2010 s/d 28 Desember 2010, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN REJANG LEBONG** “ Pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

A. n. /Dekan  
Pembantu Dekan I.  
**Yoserwan, SH, MH, LL.M**  
NIP. 19621231 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
- 3.Sdr. Pembimbing I dan II
- ④ 4.Sdr.yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

# Fakultas Hukum Universitas Andalas

Jalan Pancasila No. 10 Padang - 25117

Telp. (0751) 27404

Nomor : 334/J16.4/KM-RM/2010 .

Padang, 28 September 2010

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka  
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kesbang Linmas

Provinsi Sumbar

di

Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

N a m a : **Debby Susanty**  
Nomor Bp : 06 940 140  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri.**  
Alamat : Jl. Kesehatan III No.7 Lapai Padang  
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan  
Judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KABUPATEN REJANG LEBONG"**  
Waktu : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Any. Dekan  
Pembantu Dekan I,  
  
**Yoserwan, SH, MH, LLM**  
NIP. 196212311989011002.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1.Sdr. Rektor Universitas Andalas.
- 2.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3.Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
- 4.Sdr. Pembimbing I dan II
- 5.Sdr.yang bersangkutan.
- 6.Pertinggal



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**KANTOR WILAYAH BENGKULU**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A CURUP**

*Jalan Nusirwan No. 38 Telp. (0732) 21167 CURUP – Kode Pos 39111*

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : W21.Eb.Ps- 01- 01- 464

yang bertanda tangan dibawah ini :

AMA : Sri Harmowo S , Bc.IP,SH  
ANGKAT /NIP : Penata Muda TK.I .III / b / 196705071986031001  
batan : Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Curup

enga ini Menerangkan :

ma : Debby Susanty  
omor BP : 06940140  
kerjaan : Mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
amat : Jl . Kesehatan No.111 No.07 Lapai Padang

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan  
as II.A Curup,guna kepentingan Skripsi yang berjudul .....

**“ PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA DI  
MBAGA PEMASYRAKATAN KABUPATEN REJANG LEBONG”**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat  
ergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Curup  
Pada tanggal : 18 Oktober 2010

UNTUK KEDJAJARAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN Kelas II.A Curup  
Kasi Binadik  
DIPARTEREN HUKUM DAN HAM ASASI HUMANITARIAN  
CURUP  
SRI HARMOWO.S, Bc.IP, SH  
NIP. 19670507 198603 1 001



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554  
**PADANG**

Nomor : B.070/1108/WAS-BKPL/2010

Padang, 6 Oktober 2010

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Kepada :

Yth. Bapak Gubernur Prov. Bengkulu  
Cq. Kaban Kesbangpol dan Linmas  
di-

Bengkulu

Dengan hormat,

1. Memperhatikan surat Dekan Fakultas Hukum Unand Padang Nomor : 334/J16.4/KM-RM/2010 tanggal 28 September 2010 perihal Izin Melakukan Penelitian, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : Debby Susanty  
Tempa/ Tgl Lahir : Padang / 28 - 04 - 1988  
Pekerjaan : Mahasiswi  
No. Kartu Identitas : 06.940.140  
Alamat : Jln. Kesehatan III No. 7. Lapai Padang  
Lokasi / Tempat Penelitian : Lembaga Pemasarakatan Kab. Rejang Lebong  
Waktu / Lama Penelitian : 3 Bulan  
Anggota :

2. Maksud dan tujuan melakukan Penelitian adalah untuk bahan pembuatan skripsi, guna menyelesaikan studinya ditingkat akhir dengan Judul :

**Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Kab. Rejang Lebong**

Pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.

3. Demikianlah untuk Bapak maklumi. Atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
PROV. SUMATERA BARAT  
Kabid Administrasi



Nip. 19550712 198610 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Kemendagri Cq. Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sbg laporan)
3. Sdr. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kab. Rejang Lebong di Rejang Lebong
4. Peringgal



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH BENGKULU  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A CURUP**

*Jalan Nusirwan No. 38 Telp. (0732) 21167 CURUP – Kode Pos 39111*

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : W21.Eb.Ps- 01- 01- 464

yang bertanda tangan dibawah ini :

**AMA** : Sri Harmowo S , Bc.IP,SH  
**ANGKAT /NIP** : Penata Muda TK.I .III / b / 196705071986031001  
**abatan** : Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Curup

nga ini Menerangkan :

**ma** : Debby Susanty  
**mor BP** : 06940140  
**kerjaan** : Mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
**mat** : Jl . Kesehatan No.111 No.07 Lapai Padang

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan  
as II.A Curup,guna kepentingan Skripsi yang berjudul .....

**" PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA DI  
MBAGA PEMASYRAKATAN KABUPATEN REJANG LEBONG"**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat  
gunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : 18 Oktober 2010







## REKOMENDASI

NOMOR : 070/ ~~429~~ /KBPPM

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Sumatera Barat Nomor B.070/1108/WAS-BKPL/2010 tanggal 6 Oktober 2010 hal Rekomendasi Izin Penelitian atas nama :

1. Nama : **DEBBY SUSANTY**
2. NPM : 06.940.140
3. Alamat : Universitas Andalas Padang (Fakultas Hukum)
5. Waktu : Oktober 2010 s.d Desember 2010
6. Lokasi : Lembaga Pemasyarakatan Kab. Rejang Lebong
7. Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.**
8. Pengikut : -

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan diadakannya Penelitian dimaksud, dengan catatan/ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian harus melapor ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong.
2. Penelitian tidak boleh menyimpang dari Proposal Penelitian.
3. Harus mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan hasil Penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
5. Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila Pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut diatas.
6. Rekomendasi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

CURUP, 13 OKTOBER 2010

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
Kabid. Pembinaan Kebangsaan dan  
Permasalahan Strategis Daerah

  
**DEVA AGASTHA, SH, MM**  
Kabid. Pembinaan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat (IV.a)  
NIP. 19690820 199403 1 012